KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ada 377 dugaan pelanggaran, TKA SMA punya banyak kelemahan
Tanggal : Selasa, 10 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Ada 377 Dugaan Pelanggaran

TKA SMA Punya Banyak Kelemahan

ANGGOTA Komisi X DPR Habib Syarief meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka hasil investigasi terhadap 377 dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA/SMK atau sederajat. Hasil investigasi tersebut jangan hanya berhenti pada pemeriksaan dan klarifikasi. Jika sudah ditemukan pihak yang bertanggung jawab, mesti ada sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku agar publik tahu dan ada efek jera ke depannya.

"Penindakan dan sanksi tegas mesti dijatuhkan kepada seluruh oknum yang terbukti merusak integritas evaluasi pendidikan nasional," ucap Syarief di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Sebelumnya, Kemendikdasmen mencatat adanya 377 pelanggaran dalam pelaksanaan TKA jenjang SMA sederajat 2026. Artinya, dari total sekitar 3,73 juta peserta TKA, 377 dugaan pelanggaran tersebut setara dengan sekitar 0,07 persen. Dari jumlah itu, sebanyak 14 temuan masuk kategori pelanggaran berat.

Syarief melanjutkan, penerbitan Surat Edaran Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Nomor 001 Tahun 2026 tidak boleh berhenti sebagai formalitas di atas kertas tanpa adanya penegakan sanksi riil bagi penyeleweng. Langkah administratif dan pemeriksaan internal, mesti diikuti dengan penegakan aturan yang jelas. "Pihak-pihak yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi tegas sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya," tegasnya.

Ia mengingatkan, pembiaran terhadap aksi kecurangan berisiko meruntuhkan kepercayaan masyarakat atas kredibilitas standar kelulusan dan peta mutu akademik nasional. Kejujuran serta asas keadilan bagi jutaan siswa yang mengerjakan ujian secara mandiri wajib dilindungi instrumen negara. "TKA merupakan instrumen penting untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik sehingga integritasnya harus dijaga," tandas politisi PKB ini.

Untuk itu, Syarief meminta Kemendikdasmen bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperketat keamanan siber sistem TKA berbasis komputer untuk mencegah kebocoran soal atau intervensi peranti kecerdasan buatan (AI). Prosedur seleksi dan pelatihan etika bagi pengawas ujian di daerah juga mendesak untuk dirombak total. "Pemerintah perlu memastikan seluruh proses pengawasan diperketat dari hulu ke hilir. Pengawas yang tidak profesional mesi ditindak keras agar tidak mencederai marwah pendidikan," tegasnya.

Syarief mengimbau, aturan penjatuhan sanksi pembatalan nilai bagi peserta yang berbuat curang serta pencabutan lisensi pengawas untuk dieksekusi secara terukur berdasarkan bukti audit yang valid. Keadilan evaluasi belajar dipandang sebagai hak konstitusional seluruh anak didik di Indonesia. Karena yang perlu dilindungi adalah hak seluruh peserta didik untuk mendapatkan proses evaluasi yang jujur dan adil. ■ TIF